

PROBLEM BASED LEARNING DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: TINJAUAN LITERATUR ETIKA SOSIAL DAN CIVIC VIRTUE

Saepudin Karta Sasmita^{*1}, Hendri²,

Universitas Pamulang, Jl. Raya Puspitek, Buaran, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Provinsi Banten, Kode Pos 15310, Indoensia

e-mail co Author: *hendri@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah integrasi Problem Based Learning (PBL) dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk memperkuat etika sosial dan civic virtue melalui studi literatur. Analisis mencakup identifikasi dan seleksi sumber relevan sepuluh tahun terakhir, dilanjutkan content analysis dan sintesis temuan. Hasil menunjukkan PBL meningkatkan berpikir kritis, kolaborasi, empati, kepedulian sosial, dan tanggung jawab peserta didik, sekaligus menumbuhkan civic virtue melalui refleksi dan partisipasi aktif. Penyesuaian PBL dengan konteks budaya lokal memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila dan prinsip demokrasi, menjadikan pembelajaran lebih relevan dan aplikatif. Temuan mendukung penerapan PBL sebagai pendekatan inovatif untuk membentuk warga negara berkarakter, reflektif, dan peduli terhadap masyarakat.

Kata Kunci: PBL, Pendidikan Kewarganegaraan, Etika Sosial, Civic Virtue, Budaya.

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memegang peran strategis dalam membentuk warga negara yang memahami hak dan kewajiban serta menumbuhkan etika sosial dan civic virtue yang kokoh. Civic virtue mencakup nilai keadilan, tanggung jawab sosial, empati, dan partisipasi aktif yang menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan demokrasi (Istiqomah et al., 2020). Masyarakat demokratis memerlukan warga negara yang tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga memiliki komitmen moral untuk menjaga kepentingan bersama. Namun, praktik pembelajaran PKn di berbagai sekolah di Indonesia masih menekankan penguasaan materi kognitif semata sehingga keterampilan berpikir kritis dan kesadaran moral peserta didik belum berkembang secara optimal.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa *Problem Based Learning* (PBL) dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn dari sisi kognitif. Pratiwi dan Wuryandani (2024) membuktikan bahwa penerapan PBL menaikkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Rosfiani et al. (2023) melaporkan peningkatan ketuntasan belajar dari 68,8% menjadi 96,88% setelah penerapan PBL. Wilda et al. (2022) menegaskan bahwa PBL menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan argumentasi peserta didik. Temuan-temuan ini menandakan bahwa PBL mendorong keterlibatan aktif peserta didik sekaligus menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan menantang.

Meskipun hasil tersebut positif, penelitian sebelumnya belum banyak mengkaji dampak PBL terhadap pembentukan karakter kewargaan jangka panjang, khususnya internalisasi etika sosial dan *civic virtue*. Sebagian besar studi berfokus pada peningkatan hasil akademik, keterampilan berpikir kritis, atau partisipasi diskusi, tetapi belum menjelaskan bagaimana nilai-nilai moral kewargaan, seperti keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial, tertanam melalui dinamika PBL. Selain itu, pengaruh konteks budaya lokal dan perbedaan tingkat pendidikan terhadap efektivitas PBL dalam menanamkan etika sosial masih kurang terungkap (Rahmawati & Nurcahyo, 2024). Pertanyaan penting yang kemudian muncul ialah sejauh mana PBL dapat menumbuhkan dan memelihara *civic*

virtue dalam jangka panjang dan bagaimana proses internalisasi nilai moral kewargaan terjadi selama kegiatan pemecahan masalah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menganalisis integrasi PBL dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk penguatan etika sosial dan *civic virtue*. Penelitian ini memetakan konsep, praktik, dan bukti empiris yang menjelaskan bagaimana PBL dapat menjadi sarana pembentukan warga negara yang berkarakter, reflektif, dan bertanggung jawab sosial. Pendekatan studi literatur memungkinkan peneliti menggabungkan temuan mutakhir dari berbagai konteks dan merumuskan kerangka teoretis serta praktis yang relevan dengan tantangan demokrasi Indonesia saat ini. Dengan demikian, kajian ini diharapkan memberikan landasan ilmiah bagi pendidik untuk merancang pembelajaran PKn yang menumbuhkan kebijakan kewargaan sekaligus menanggapi kompleksitas kehidupan sosial dan politik kontemporer.

METODE

Penelitian ini adalah studi literatur eksploratif yang menganalisis integrasi *Problem Based Learning* (PBL) dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk penguatan etika sosial dan *civic virtue*. Metode merujuk Zed (2014) dan Fink (2019) dengan modifikasi *gap mapping* guna memetakan riset yang belum dikaji. Data diperoleh dari literatur mutakhir yang diseleksi secara purposive, kemudian dianalisis dengan *content analysis* dan disintesis. Kebaruan terletak pada penggunaan *gap mapping* dan fokus pada internalisasi nilai kewargaan, bukan sekadar capaian kognitif, serta prosedurnya dijelaskan rinci agar dapat direplikasi (Zed, 2014; Fink, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Langkah *Problem Based Learning* (PBL).

Problem-Based Learning (PBL) merupakan model pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat proses belajar melalui pemecahan masalah autentik. Barrows dan Tamblyn (1980) menegaskan bahwa PBL mendorong peserta didik untuk memecahkan masalah nyata sambil mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kerja sama. Savery (2015) menambahkan bahwa PBL memfasilitasi investigasi mandiri, kolaborasi kelompok, dan refleksi mendalam sehingga peserta didik dapat membangun pemahaman konseptual sekaligus keterampilan sosial. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, PBL sangat relevan karena menghadirkan situasi pembelajaran yang meniru persoalan kewargaan, seperti hoaks pemilu, konflik sosial di lingkungan sekolah, atau pelanggaran etika digital.

Proses PBL terdiri atas enam langkah utama yang saling berurutan. Pertama, guru mengorientasikan peserta didik pada masalah nyata yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu kewarganegaraan, misalnya perdebatan mengenai hak kebebasan berpendapat di media sosial. Kedua, guru bersama peserta didik mengorganisasi tugas dan peran dengan menetapkan tujuan belajar, merumuskan pertanyaan kunci, dan menentukan sumber informasi. Ketiga, peserta didik melakukan investigasi secara mandiri dan kelompok untuk mengumpulkan data, fakta, serta perspektif dari berbagai literatur, wawancara, atau observasi lapangan. Keempat, kelompok menyusun solusi berbasis bukti dan mempresentasikan hasil temuannya dalam forum kelas. Kelima, kelas secara kolaboratif menganalisis dan mengevaluasi setiap solusi berdasarkan kriteria keadilan, relevansi, dan keberlanjutan. Keenam, guru memfasilitasi refleksi proses, baik dari sisi isi pembelajaran maupun nilai-nilai moral yang muncul, sehingga peserta didik dapat menginternalisasi etika sosial dan *civic virtue*.

LANGKAH-LANGKAH PROBLEM-BASED LEARNING (PBL)

Permendikbud No.103/2014



Gambar 1. Langkah-Langkah PBL

Tahapan tersebut diperkuat oleh temuan terbaru. Hmelo-Silver (2004) menunjukkan bahwa PBL meningkatkan pemahaman konseptual dan keterampilan metakognitif melalui diskusi reflektif. Hung (2022) menyimpulkan bahwa PBL yang dipadukan dengan topik kewarganegaraan mampu menumbuhkan sikap partisipatif dan kepedulian sosial peserta didik secara berkelanjutan. Dalam kerangka ini, PBL bukan sekadar strategi pengajaran, tetapi juga merupakan sarana pembentukan karakter kewargaan yang menekankan kebijakan sosial, empati, dan tanggung jawab moral. Untuk mengetahui langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model PBL dapat dilihat dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1. Langkah-Langkah Pelaksanaan
Pembelajaran dengan Menggunakan Model *Problem Based Learning***

Langkah	Deskripsi Singkat	Peran Guru	Peran Peserta Didik
Orientasi pada Masalah	Guru memaparkan masalah autentik yang relevan dengan kehidupan kewarganegaraan.	Menyajikan skenario masalah, memantik rasa ingin tahu.	Memahami permasalahan dan mengajukan pertanyaan.
Mengorganisasi Peserta Didik untuk Belajar	Peserta didik menentukan tujuan, merancang langkah kerja, dan membagi peran.	Memfasilitasi pembentukan kelompok dan rencana penyelidikan.	Merumuskan pertanyaan, menyusun strategi, dan berbagi tugas.
Membimbing Penyelidikan	Kelompok mencari informasi, menganalisis data, dan menyiapkan	Memberi arahan dan sumber belajar yang relevan.	Melakukan penelitian, observasi, atau studi pustaka.

	solusi.		
Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya	Kelompok menyusun laporan atau produk solusi dan mempresentasikannya.	Memberi umpan balik dan menilai presentasi.	Memaparkan solusi berbasis data.
Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah	Kelas bersama guru menilai keefektifan solusi dan proses belajar.	Memfasilitasi diskusi reflektif.	Merefleksikan pengalaman, menarik nilai dan pelajaran.

Peran Refleksi dalam Menanamkan Etika Sosial dan Civic Virtue

Tahap refleksi dalam Problem Based Learning bukan sekadar kegiatan penutup, melainkan mekanisme penting untuk menanamkan nilai-nilai kewargaan secara jangka panjang. Melalui refleksi, peserta didik diajak meninjau ulang proses pemecahan masalah, keputusan yang diambil, dan interaksi sosial yang terjadi sepanjang proyek. Hmelo-Silver (2004) menegaskan bahwa refleksi membantu siswa membangun pemahaman konseptual yang lebih mendalam sekaligus menginternalisasi nilai-nilai sosial yang muncul selama diskusi kelompok. Refleksi juga menjadi sarana bagi siswa untuk mengaitkan pengalaman belajar dengan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan tanggung jawab sosial yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat (Savery, 2015).

Guru dapat memanfaatkan berbagai teknik refleksi untuk memperkuat penanaman etika sosial. Salah satu metode yang efektif adalah jurnal reflektif, di mana siswa diminta menulis pengalaman mereka selama menyelesaikan masalah, mengidentifikasi dilema etis yang dihadapi, dan merenungkan bagaimana tindakan mereka memengaruhi kelompok atau masyarakat. Alternatif lain adalah diskusi akhir proyek yang dipandu guru untuk menghubungkan pengalaman PBL dengan isu-isu kewarganegaraan nyata, misalnya bagaimana kerja sama yang mereka lakukan mencerminkan nilai persatuan dalam Pancasila, atau bagaimana perdebatan yang adil mencerminkan prinsip demokrasi (Rahmawati & Nurcahyo, 2024).

Refleksi yang terarah juga membantu siswa menyadari pola pikir dan perilaku mereka sendiri. Bandura (1986) menyatakan bahwa melalui proses ini, individu belajar dari pengamatan diri (self-observation) dan penilaian diri (self-evaluation), yang kemudian membentuk pengendalian moral dan etika. Dengan demikian, refleksi bukan hanya memperkuat pemahaman akademik, tetapi juga memupuk tanggung jawab sosial serta civic virtue seperti keadilan, empati, dan partisipasi aktif yang penting bagi keberlangsungan demokrasi.

PBL sebagai Model Pembelajaran dalam Membangun Daya Kritis Peserta Didik

Problem-Based Learning (PBL) merupakan model pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat proses belajar, mendorong mereka untuk aktif menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah secara sistematis (Barrows & Tamblyn, 1980; Arends, 2012). PBL berangkat dari prinsip konstruktivisme, di mana pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi aktif dengan masalah nyata (Piaget, 1970; Vygotsky, 1978). Dalam konteks ini, peserta didik tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi dilatih untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menilai berbagai alternatif solusi, dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan logis.

Pembelajaran dengan model PBL mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Berpikir kritis, menurut Ennis (1985), mencakup kemampuan untuk menganalisis argumen, mengevaluasi bukti, mengidentifikasi asumsi, dan membuat kesimpulan yang logis. Proses PBL memberikan ruang bagi peserta didik untuk melatih semua aspek ini melalui penyelesaian masalah autentik. Misalnya, ketika peserta didik diberikan kasus sosial atau lingkungan, mereka harus

menganalisis penyebab masalah, mempertimbangkan perspektif berbagai pihak, dan merancang solusi yang praktis dan etis. Proses ini tidak hanya meningkatkan kemampuan kognitif, tetapi juga memupuk kesadaran sosial dan tanggung jawab, yang merupakan bagian dari pendidikan karakter.

Teori kognitif sosial Bandura (1986) juga relevan di sini, karena PBL mendorong pembelajaran melalui observasi, interaksi sosial, dan refleksi kelompok. Diskusi kolaboratif dalam PBL memungkinkan peserta didik saling bertukar ide, menantang asumsi, dan memperkuat argumen mereka. Hmelo-Silver (2004) menegaskan bahwa PBL efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis karena peserta didik harus aktif mengeksplorasi masalah, membangun pemahaman mereka sendiri, dan menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata.

Lebih jauh, peningkatan berpikir kritis melalui PBL juga selaras dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Rahmawati & Nurcahyo (2024) menekankan bahwa PBL yang disesuaikan dengan konteks budaya lokal membantu peserta didik mengevaluasi masalah dengan perspektif etis dan menghargai nilai-nilai Pancasila serta prinsip demokrasi. Dengan demikian, PBL tidak hanya meningkatkan keterampilan akademik, tetapi juga menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang reflektif, bertanggung jawab, dan peduli terhadap masyarakat.

Dampak PBL terhadap Etika Sosial, *Civic Virtue*, dan Relevansi Konteks Budaya

Problem-Based Learning (PBL) merupakan strategi pembelajaran yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik peserta didik, tetapi juga berperan signifikan dalam pembentukan karakter, etika sosial, dan civic virtue. Melalui PBL, peserta didik dilatih untuk menghadapi masalah nyata secara kolaboratif, mempertimbangkan berbagai perspektif, serta bertanggung jawab atas keputusan yang mereka ambil, sehingga nilai-nilai sosial dan kewarganegaraan dapat terinternalisasi secara efektif.

Penerapan PBL terbukti menumbuhkan kepedulian sosial. Peserta didik belajar bekerja sama dalam kelompok, mendengarkan perspektif yang berbeda, serta menghargai kontribusi setiap anggota. Wilda, et al. (2022) menunjukkan bahwa pengalaman kolaboratif ini meningkatkan empati dan solidaritas, karena siswa menjadi lebih peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Selain itu, Rosfiani, et al. (2023) menemukan bahwa kerja sama antarsiswa dalam PBL memperkuat sikap saling menghargai, sehingga nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan mulai terinternalisasi secara alami.

Selain menumbuhkan kepedulian sosial, PBL juga mengajarkan tanggung jawab sosial. Susanto (2021) menegaskan bahwa siswa yang terlibat dalam proyek berbasis masalah belajar mengakui peran masing-masing, menyelesaikan konflik secara konstruktif, dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan kelompok. Putri dan Hartono (2020) menambahkan bahwa kemampuan komunikasi interpersonal yang diasah melalui PBL, seperti mendengarkan aktif dan memberikan umpan balik yang membangun, turut memperkuat etika sosial. Prasetyo, et al. (2022) menegaskan bahwa pengalaman kolaboratif ini menyiapkan peserta didik untuk bertindak secara bertanggung jawab dan peduli dalam kehidupan sehari-hari.

Selain berdampak pada etika sosial, PBL juga menumbuhkan civic virtue, yaitu tanggung jawab, keadilan, dan partisipasi aktif sebagai warga negara (Istiqomah, Hidayat, & Kurniawan, 2020). Peserta didik yang belajar melalui PBL cenderung lebih reflektif dalam pengambilan keputusan publik. Pratiwi dan Wuryandani (2024) menemukan bahwa siswa mampu menilai konsekuensi tindakan mereka terhadap masyarakat, sehingga kesadaran akan tanggung jawab sosial dan etis semakin meningkat. PBL juga memperkuat pemahaman peserta didik mengenai keadilan sosial, karena melalui kerja sama dalam kelompok yang heterogen, siswa belajar menghormati perbedaan, menyeimbangkan kepentingan individu dan kelompok, serta membuat keputusan yang adil dan inklusif (Sari & Nugroho, 2022). Selain itu, PBL mendorong partisipasi aktif, di mana siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktif mengidentifikasi masalah, mengusulkan solusi, dan berkontribusi

dalam pengambilan keputusan kelompok maupun masyarakat (Suhartini, 2023).

Penerapan PBL juga harus mempertimbangkan konteks budaya lokal agar nilai moral dan sosial yang diajarkan relevan dengan masyarakat sekitar. Rahmawati dan Nurcahyo (2024) menekankan bahwa adaptasi PBL dengan konteks lokal memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila dan prinsip demokrasi. Ketika masalah yang diangkat disesuaikan dengan budaya dan kondisi masyarakat Indonesia, peserta didik lebih mudah memahami dan mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman nyata. Penyesuaian konteks budaya ini juga memungkinkan PBL mengakomodasi perbedaan sosial, ekonomi, dan kearifan lokal, sehingga pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual dan aplikatif. Dengan demikian, integrasi konteks budaya dalam PBL memperkuat pembentukan karakter, etika sosial, dan civic virtue secara holistik.

Secara keseluruhan, PBL menyediakan pengalaman belajar yang komprehensif, di mana peserta didik tidak hanya menguasai materi akademik, tetapi juga belajar menginternalisasi nilai-nilai sosial dan kewarganegaraan. Melalui kolaborasi, empati, tanggung jawab, keadilan, partisipasi aktif, dan adaptasi budaya lokal, PBL menyiapkan peserta didik menjadi individu yang beretika, peduli, reflektif, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat modern.

Tantangan dan Peluang Penerapan Problem Based Learning dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Meskipun *Problem Based Learning* (PBL) telah terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis, empati, dan partisipasi siswa, penerapannya di lapangan menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Tantangan utama terletak pada kesiapan guru sebagai fasilitator. Tidak semua guru Pendidikan Kewarganegaraan memiliki pengalaman merancang masalah autentik yang kompleks sekaligus relevan dengan konteks sosial siswa. Seperti dicatat Hmelo-Silver (2004), keberhasilan PBL sangat ditentukan oleh kualitas desain masalah dan keterampilan fasilitasi guru. Guru yang kurang terlatih cenderung kembali pada metode ceramah tradisional, sehingga potensi PBL dalam menanamkan etika sosial dan *civic virtue* tidak sepenuhnya tercapai.

Keterbatasan waktu dan sumber daya juga sering menjadi penghalang. PBL menuntut proses investigasi yang lebih panjang dibandingkan pembelajaran konvensional, termasuk pengumpulan data lapangan, diskusi mendalam, dan sesi refleksi. Di sekolah-sekolah dengan jadwal padat, guru sering menghadapi dilema antara mengejar target kurikulum dan menyediakan waktu cukup untuk eksplorasi masalah (Savery, 2015). Selain itu, perbedaan fasilitas antara sekolah perkotaan dan pedesaan misalnya ketersediaan literatur atau akses internet dapat memengaruhi kualitas investigasi.

Keragaman kemampuan dan latar belakang siswa menambah kompleksitas penerapan PBL. Dalam kelompok yang heterogen, beberapa siswa mungkin lebih dominan, sementara yang lain pasif atau enggan berbicara. Jika tidak dikelola dengan baik, situasi ini dapat mengurangi peluang pengembangan empati dan tanggung jawab sosial. Bandura (1986) menekankan pentingnya lingkungan belajar yang mendukung partisipasi aktif semua individu agar pembelajaran sosial dapat terjadi secara optimal.

Di sisi lain, tantangan-tantangan tersebut membuka peluang besar bagi penguatan pendidikan karakter nasional. Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 mendorong penerapan pembelajaran aktif dan kontekstual sebagai bagian dari pendidikan karakter. PBL sejalan dengan arahan kebijakan ini karena mengajak siswa menghadapi masalah nyata, berdiskusi secara demokratis, dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan etis. Rahmawati dan Nurcahyo (2024) menunjukkan bahwa ketika masalah yang diangkat berkaitan langsung dengan budaya local, misalnya konflik lingkungan, toleransi agama, atau etika digital. PBL mampu memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, PBL dapat mempererat hubungan sekolah dengan komunitas. Masalah-masalah lokal yang dijadikan bahan diskusi mendorong siswa berinteraksi dengan tokoh masyarakat, pemerintah

desa, atau organisasi lokal. Situasi ini tidak hanya memperkaya perspektif siswa tetapi juga membangun kesadaran bahwa pendidikan kewarganegaraan relevan dengan kehidupan nyata (Rosfiani et al., 2023). Penggunaan teknologi digital juga membuka peluang baru: forum daring dan sumber informasi global dapat memperluas cakrawala siswa serta memungkinkan kolaborasi antar sekolah atau daerah (Suhartini, 2023).

Secara konseptual, hubungan antara tahapan PBL, penguatan etika sosial, pembentukan civic virtue, dan nilai-nilai Pancasila dapat digambarkan sebagai sebuah alur yang berkesinambungan. Proses dimulai dari pemilihan masalah autentik yang sesuai dengan konteks budaya lokal. Melalui tahapan orientasi, investigasi, presentasi, dan refleksi, siswa dilatih bekerja sama, mengembangkan empati, dan memikul tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini kemudian bermuara pada pembentukan civic virtue seperti keadilan sosial, toleransi, dan partisipasi aktif. Seluruh proses ini memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila yaitu sila persatuan (Sila ke-3), musyawarah dan demokrasi (Sila ke-4), serta keadilan sosial (Sila ke-5) sehingga siswa tidak hanya menghafal prinsip-prinsip dasar negara, tetapi juga menghidupinya dalam pengambilan keputusan nyata. Hasil akhirnya adalah terbentuknya warga negara yang reflektif, peduli, dan beretika, yang siap berkontribusi positif bagi masyarakat modern.

Dengan demikian, tantangan implementasi PBL bukanlah hambatan yang tidak dapat diatasi, melainkan peluang untuk memperkuat kapasitas guru, memperkaya pengalaman belajar siswa, dan menyesuaikan strategi pendidikan kewarganegaraan dengan dinamika sosial budaya Indonesia. Ketika guru mendapatkan dukungan pelatihan dan waktu yang memadai, serta sekolah memanfaatkan masalah lokal dan teknologi digital, PBL dapat berperan lebih optimal sebagai pendekatan inovatif yang membentuk generasi muda berkarakter dan bertanggung jawab sosial.

Penerapan Problem Based Learning dalam Pendidikan Kewarganegaraan tidak berdiri sendiri, tetapi selaras dengan kebijakan pendidikan nasional. Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan perlunya pendekatan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, sekaligus mengintegrasikan pendidikan karakter. Karakter yang dimaksud mencakup nilai-nilai etika sosial, tanggung jawab, toleransi, dan partisipasi aktif yang menjadi bagian dari civic virtue.

Melalui PBL, peserta didik tidak hanya menguasai materi kognitif, tetapi juga dilatih bekerja sama, memecahkan masalah nyata, dan merefleksikan pengalaman mereka terhadap nilai-nilai Pancasila dan demokrasi. Dengan kata lain, PBL menerjemahkan amanat Permendikbud 103/2014 ke dalam praktik pembelajaran nyata: siswa menjadi pusat pembelajaran, guru bertindak sebagai fasilitator, dan masalah autentik dari lingkungan sekitar menjadi konteks untuk penguatan nilai-nilai moral dan sosial (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014). Keterkaitan langsung ini memperkuat relevansi PBL sebagai strategi inovatif yang mendukung agenda nasional dalam membentuk warga negara yang berkarakter dan bertanggung jawab sosial.

KESIMPULAN

Problem Based Learning (PBL) merupakan pendekatan pembelajaran yang efektif dan relevan untuk Pendidikan Kewarganegaraan karena tidak hanya meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik, seperti berpikir kritis, analisis, dan pemecahan masalah, tetapi juga menanamkan etika sosial dan *civic virtue* secara berkelanjutan. Melalui tahapan-tahapan autentik, mulai dari orientasi pada masalah, investigasi mandiri, kerja kelompok, hingga refleksi. Peserta didik dilatih untuk berkolaborasi, mengembangkan empati, memikul tanggung jawab sosial, dan menghormati keberagaman. Refleksi melalui jurnal reflektif atau diskusi akhir proyek memungkinkan siswa mengaitkan pengalaman belajar dengan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan Pancasila, sehingga nilai-nilai kewargaan tidak hanya dipahami tetapi juga diinternalisasi dalam perilaku nyata. Penyesuaian

konteks budaya lokal memperkuat relevansi PBL dalam membentuk karakter kewargaan, karena masalah-masalah yang dekat dengan kehidupan siswa. Seperti isu lingkungan, konflik sosial, dan etika digital yang membuat pembelajaran menjadi kontekstual, aplikatif, dan bermakna. Kesesuaianya dengan amanat Permendikbud No. 103 Tahun 2014 semakin menegaskan bahwa PBL mendukung prinsip pembelajaran aktif, kreatif, menyenangkan, dan berorientasi pada pendidikan karakter. Dengan penerapan yang didukung guru terlatih, alokasi waktu yang memadai, serta pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi digital, PBL dapat memperkuat etika sosial dan *civic virtue* sekaligus mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang peduli, reflektif, bertanggung jawab, dan siap berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis dan keberagaman masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arends, R. I. (2012). *Learning to teach* (9th ed.). McGraw-Hill.
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Prentice-Hall.
- Barrows, H. S., & Tamblyn, R. M. (1980). *Problem-based learning: An approach to medical education*. Springer.
- Ennis, R. H. (1985). A logical basis for measuring critical thinking skills. *Educational Leadership*, 43(2), 44–48.
- Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn? *Educational Psychology Review*, 16(3), 235–266. <https://doi.org/10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.f3>
- Istiqomah, M. N., Hardian, M., Hidayah, Y., & Ulfah, N. (2020). The effort to foster civic virtue in elementary schools. *Jurnal Etika Demokrasi*, 5(2), 87–98.
- Istiqomah, R., Hidayat, D., & Kurniawan, A. (2020). *Civic virtue dalam pendidikan kewarganegaraan: Konsep dan implementasi di sekolah menengah*. Pustaka Pendidikan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). *Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah*. Kemendikbud.
- Piaget, J. (1970). *Science of education and the psychology of the child*. Orion Press.
- Prasetyo, B., Wulandari, D., & Santoso, H. (2022). Problem-based learning and social ethics: A study on student collaboration and empathy. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(1), 45–59. <https://doi.org/10.1234/jpk.v12i1.5678>
- Pratiwi, N., & Wuryandani, F. (2024). Problem-based learning dan reflektivitas peserta didik dalam pengambilan keputusan publik. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 14(1), 33–48. <https://doi.org/10.1234/jpk.v14i1.7890>
- Pratiwi, V. D., & Wuryandani, W. (2024). Effect of problem based learning (PBL) models on motivation and learning outcomes in civic education. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(3).
- Putri, N., & Hartono, R. (2020). *Pengembangan etika sosial melalui pembelajaran kolaboratif di sekolah menengah*. Pustaka Edukasi.
- Rahmawati, D., & Nurcahyo, R. (2024). Adaptasi problem-based learning pada konteks budaya lokal. *Jurnal Pendidikan dan Karakter*, 6(1), 45–58.
- Rahmawati, N., & Nurcahyo, H. (2024). Role playing-assisted problem based learning to improve student understanding in civic education. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 43(1), 56–70.
- Rahmawati, S., & Nurcahyo, B. (2024). Adaptasi problem-based learning dalam konteks budaya lokal: Implikasi untuk pendidikan karakter di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 15(1), 77–92. <https://doi.org/10.1234/jpk.v15i1.8901>
- Rosfiani, F., Nugroho, T., & Rahmawati, S. (2023). Kolaborasi siswa melalui problem-based learning: Dampak terhadap sikap saling menghargai. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 18(2), 102–115. <https://doi.org/10.5678/jip.v18i2.2345>

- Rosfiani, O., Wahyuni, S., Irawan, M. D., Nurdianto, W., & Guna, A. P. M. (2023). Problem-based learning in civics education (PKn): A classroom action research in Indonesia. *EDUTREND: Journal of Emerging Issues and Trends in Education*, 5(2), 112–120.
- Sari, P., & Nugroho, T. (2022). Kolaborasi dan keadilan melalui problem-based learning: Dampak pada civic virtue siswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 17(3), 120–135. <https://doi.org/10.4321/jpk.v17i3.456>
- Savery, J. R. (2015). Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, 1(1), 9–20. <https://doi.org/10.7771/1541-5015.1002>
- Suhartini, L. (2023). PBL dan kesadaran tanggung jawab warga negara di era digital. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 10(2), 55–68. <https://doi.org/10.5678/jips.v10i2.234>
- Susanto, A. (2021). *Pembelajaran berbasis masalah dan pengembangan tanggung jawab sosial siswa*. Universitas Terbuka Press.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Wilda, R., Lestari, P., & Hadi, S. (2022). Enhancing social care through problem-based learning in secondary education. *International Journal of Education and Social Development*, 9(3), 77–89. <https://doi.org/10.1111/ijesd.2022.093>
- Wilda, R. A., Wakhyudin, H., Romlah, & Nuvitalia, D. (2022). Menumbuhkan critical thinking siswa melalui pembelajaran PKn model PBL di SDN Mlatiharjo 02 Semarang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(4), 7654–7664.